

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem peradilan pidana pada hakikatnya merupakan sistem yang melibatkan hubungan antara beberapa lembaga (yang disebut sebagai subsistem) yang dikenal sebagai lembaga penegak hukum. Pemasyarakatan dalam kaitannya dengan sistem peradilan pidana kerap kali dipadankan dengan lembaga *corection* yang diletakkan sebagai lembaga purna adjudikasi (*post adjudication*) dalam sistem peradilan pidana.¹

Pelaksanaan pembinaan narapidana berdasarkan sistem pemasyarakatan bertujuan agar narapidana menjadi manusia seutuhnya, sebagaimana telah menjadi arah pembangunan nasional, melalui jalur pendekatan memantapkan iman dan membina mereka agar mampu berintegrasi secara wajar di dalam kehidupan kelompok selama dalam Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) setelah menjalani pidananya.²

Balai Pemasyarakatan (BAPAS) merupakan subsistem pemasyarakatan yang sangat penting namun sering kali terlupakan. Balai Pemasyarakatan (BAPAS) seolah-olah hanya berperan dalam peradilan pidana anak padahal peran Balai Pemasyarakatan (BAPAS) bukan hanya

¹ Eva Achjani Zulfa dkk, 2017, *Perkembangan Sitem Pemidanaan dan Sistem Pemasyarakatan*, Rajagrafindo Persada, Depok, Hlm 63

² Direktorat Bina Bimbingan Kemasyarakatan, 2005, *Buku Pedoman Pembebasan Bersyarat*, Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, Hlm 1

berperan dalam peradilan anak, akan tetapi juga dalam penanganan perkara terpidana dewasa. Dalam periode mendatang dengan perkembangan berbagai jenis sanksi pidana baru dalam RKUHP VERSI 2016 dapat diduga bahwa peran yang akan dimainkan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) menjadi lebih besar dari peran yang dimainkan Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) pada saat ini. Sebut saja sanksi kerja sosial atau jenis pidana pengawasan yang ranah pelaksanaannya sudah pasti melibatkan lembaga ini.³

Tujuan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) melakukan pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan adalah melakukan pembinaan bagi warga pembinaan warga pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan sebagai salah satu dari bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam sistem peradilan pidana setelah pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) didalam Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dipersiapkan berbagai program pembinaan bagi narapidana sesuai dengan tingkat pendidikan, jenis kelamin, agama, dan jenis tindak pidana yang dilakukan narapidana tersebut. Dalam Balai Pemasyarakatan (BAPAS) program pembinaan bagi narapidana disesuaikan pula dengan hukuman yang dijalani para narapidana anak didik agar mencapai sasaran yang ditetapkan yaitu agar mereka menjadi warga baik dikemudian hari.⁴

Hakikatnya Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai insan dan sumber daya manusia harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi

³ *Ibid*, Hlm 90-91

⁴ C.Djisman Samosir, 2016, *PENOLOGI dan PEMASYARAKATAN*, NUANSA AULIA, Bandung , Hlm 198.

dalam satu sistem pembinaan yang terpadu, perlakuan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem kepenjaraan tidak sesuai dengan sistem pemasyarakatan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan. bahwa sistem pemasyarakatan merupakan rangkaian penegakan hukum yang bertujuan agar Warga Binaan Pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Balai Pemasyarakatan (BAPAS) mempunyai tugas sebagai pembimbing kemasyarakatan yang bertugas membimbing warga binaan pemasyarakatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ini sesuai dengan tugas pokok Balai Pemasyarakatan (BAPAS) yang memberikan bimbingan dan pengawasan terhadap Klien Pemasyarakatan. Bimbingan Klien Pemasyarakatan adalah bagian dari sistem pemasyarakatan yang menjiwai tata peradilan pidana dan mengandung aspek penegakan hukum dalam rangka pencegahan kejahatan dan bimbingan pelanggar hukum, dalam pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Oleh karena permasalahan diatas maka disini penulis berkeinginan untuk melakukan penulisan penelitian hukum untuk mengetahui Peran

Balai Pemasyarakatan dalam Resosialisasi Klien Pemasyarakatan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang sudah penulis simpulkan diatas maka Rumusan Masalah dari Penelitian ini adalah: Apakah upaya pembinaan yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan sesuai dengan tujuan Resosialisasi?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui dan memahami proses dan pengaruh bimbingan Balai Pemasyarakatan terhadap resosialisasi narapidana sesuai dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan bidang hukum pidana pada khususnya.

2. Manfaat praktis :

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada:

a. Masyarakat pada umumnya.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam

pembinaan narapidana di Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta untuk mencapai tujuan pemasyarakatan.

- b. Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta yang menjadi objek penelitian agar menjadi tambahan informasi dan masukan bagi Balai Pemasyarakatan yang diteliti.
- c. Instansi Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta agar dapat menjadi tambahan informasi, maupun tambahan data agar kedepan pembinaan narapidana dalam menerapkan resosialisasi sesuai dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

E. Keaslian Penelitian

Penulis menyatakan bahwa penelitian dengan judul “Peran Balai Pemasyarakatan dalam Resosialisasi Klien Pemasyarakatan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan” merupakan hasil karya penulis sendiri dan bukan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil penelitian lain. Hal ini dapat dibuktikan dengan memperbandingkan penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu, yaitu:

1. Reymon Axel Amalo, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta dengan judul Skripsi “Pemenuhan Hak Narapidana Tindak Pidana Korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Untuk Mendapatkan Pengurangan Masa Pidana (Remisi). Rumusan masalahnya adalah Bagaimanakah

pemenuhan hak narapidana tindak pidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan untuk mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi).

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan oleh penulis di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan, maka penulis menyimpulkan bahwa pemenuhan hak narapidana tindak pidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan untuk mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi) yaitu pertama-tama narapidana harus menjalani pidana selama 6 (enam) bulan dari keseluruhan masa pidana yang dijatuhkan padanya, berkelakuan baik bersedia bekerja sama dengan pemerintah untuk membongkar kasus tindak pidana yang dilakukannya dan juga membayar ganti kerugian sesuai dengan jumlah yang ditentukan sesuai dengan keputusan pengadilan. Setelah itu Kepala Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan mengusulkan pemberian remisi bagi narapidana ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Yogyakarta. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham akan memberikan remisi setelah memperoleh pertimbangan dari Direktur Jendral Pemasyarakatan.

Berdasarkan data yang diperoleh oleh penulis dari awal tahun 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal 20 September 2016, jumlah narapidana tindak pidana korupsi sebanyak 41

orang, yang sudah diberikan remisi sebanyak 32 (tiga puluh dua) orang, yang terdiri dari 30 (tiga puluh) laki-laki dan 2 (dua) perempuan. Dengan demikian pemberian remisi sebagaimana yang telah dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan sudah terlaksana sesuai dengan peraturan yang berlaku dan hak-hak narapidana khususnya narapidana korupsi sudah terpenuhi.

2. Dina Damayanti, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta dengan judul Skripsi “Profesionalisme Petugas Pemasyarakatan Klas II A Wirogunan. “Tujuan Penelitian; untuk memperoleh data yang akan dianalisis dalam upaya menjawab permasalahan hukum mengenai ukuran profesionalisme kinerja petugas Lembaga Pemasyarakatan dalam melaksanakan tugas membina narapidana dan untuk memperoleh data yang akan dianalisis dalam upaya menjawab rumusan permasalahan hukum mengenai meningkatkan profesionalisme petugas Lembaga Pemasyarakatan.

Hasil Penelitiannya adalah para petugas narapidana Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Wirogunan Yogyakarta telah memberikan pembinaan dan pelayanan yang profesional bagi para narapidana yaitu menguasai pekerjaan dan mampu bekerja keras. Mampu bekerjasama, mempunyai komitmen. Upaya-upaya yang dilakukan guna peningkatan

profesionalisme petugas pembina di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wirogunan Yogyakarta adalah sebagai berikut: Sebelum menjadi petugas yang akan memberikan pembinaan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan para petugas pembina diberikan pembekalan khusus mengenai ilmu-ilmu tentang pemasyarakatan. Pembekalan tersebut dilakukan dengan melihat buku panduan yang berjudul “Tata Usaha Pemasyarakatan”, sebulan sekali Kepala Seksi Bimmaswat melakukan kontrol terhadap para pekerja khususnya di Sub Seksi Bimmaswat dengan mengadakan pertemuan yang membicarakan apakah ada hambatan dalam melaksanakan pembinaan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan jika petugas di sub seksi Bimmaswat menemukan adanya hambatan dalam membina warga binaan pemasyarakatan maka didalam pertemuan tersebut akan dicari jalan keluarnya.

3. Veronica Novaliana Saraswati Dewi, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta dengan judul Skripsi “Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wirogunan (Studi Kasus Mary Jane). Rumusan masalahnya adalah Bagaimana pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wirogunan dalam studi kasus Mary Jane apakah sudah sesuai dengan tujuan pembinaan yang tertuang dalam Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Hasil penelitian pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wirogunan mengacu pada studi kasus narapidana Mery Jane, pada prinsipnya sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Mary Jane dan Narapidana yang lain dibekali dengan pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian, akan tetapi sebagian Narapidana belum memahami secara spesifik apa saja yang menjadi hak-haknya sesuai yang tertuang dalam pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 dan bagaimana cara memperolehnya.

F. Batasan Konsep

1. Balai Pemasyarakatan

Menurut Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 Pasal 1 Angka 4 yang dimaksud dengan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan warga Binaan Pemasyarakatan dan sebagai salah satu Unit Pelaksana teknis di bidang Pembinaan Luar Lembaga Pemasyarakatan yang bertanggung jawab langsung kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

2. Resosialisasi

Menurut Soerjono Soekanto Resosialisasi adalah proses sosial tempat seseorang individu mendapatkan pembentukan sikap untuk berperilaku yang sesuai dengan perilaku orang-orang di sekitarnya.

3. Narapidana

Menurut Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 Pasal 1 Angka 7 yang dimaksud dengan Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Sebagaimana disebut dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, terpidana itu sendiri adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

2. Pemasyarakatan

Menurut Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 Pasal 1 Angka 1 yang dimaksud dengan pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang dilakukan pada perilaku masyarakat. Penelitian ini dilakukan secara langsung kepada

responden sebagai data utamanya yang didukung oleh data sekunder dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Bahan hukum primer adalah data yang diambil langsung dari responden yang ada dilapangan dengan tujuan agar bisa mendapatkan hasil yang sebenarnya dari objek yang diteliti dalam hal ini adalah Balai Permayarakatan.

b.Data Sekunder:

1) Bahan hukum primer : berupa peraturan perundang-undangan yaitu :

a) Undang-Undang No 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

b) Peraturan Pemerintah No 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Pembinaan Hak Warga Binaan Masyarakat.

2) Bahan hukum sekunder :

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini terdiri dari :

Pendapat hukum dan pendapat bukan hukum yang diperoleh dari buku, kamus ,surat kabar, dan internet.

3. Cara Pengumpulan Data

a. Wawancara (interview)

Wawancara adalah suatu proses tanya jawab secara lisan, diaman adua atau lebih berhadap-hadapan secara langsung dengan

sumber data yang berhubungan atau kompeten dengan obyek yang diteliti.

b. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*) terhadap data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier yaitu dengan mencari data dalam peraturan-peraturan terkait dan penjelasannya, dokumen-dokumen resmi, dan tulisan-tulisan yang terkait dengan penelitian.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta

5. Populasi dan Sampel

Populasi keseluruhan dari obyek penelitian ini adalah petugas Balai Pemasyarakatan (BAPAS). Adapun yang menjadi responden ialah Petugas bagian Pembimbing Kemasyarakatan yang memiliki karakteristik tertentu dalam suatu penelitian. Kemudian metode pemilihan sampel dengan cara teknik sampling non random sampling dimana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian yang disebut *purposive*.

6. Responden dan Narasumber

Responden dalam penelitian ini adalah : Petugas Bapas bagian Pembimbing Kemasyarakatan

Narasumber dalam penelitian ini adalah Kepala Balai Pemasyarakatan (Kabapas) Kelas I Yogyakarta : M. Ali Syeh Banna

7. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif yaitu suatu analisis yang menghasilkan suatu data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis maupun lisan dalam perilaku nyata yang diteliti atau dipelajari sebagai suatu yang utuh.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan hukum/skripsi merupakan isi penulisan hukum/skripsi:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan konsep, metode penelitian, sistematika penulisan hukum/skripsi.

BAB II : PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan Tinjauan tentang Pembinaan oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS) terhadap Narapidana. Penulis kemudian akan menguraikan Tinjauan tentang tujuan Resosialisasi terhadap Narapidana dan keterkaitan antara

Pembina dengan Resosialisasi. Bab ini berisi tentang bagaimana proses pembinaan, sejarah Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta, visi dan misi Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta, kedudukan, tugas, dan fungsi Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta, landasan kerja, dasar hukum Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta, pembinaan narapidana, materi bimbingan, manfaat serta maksud dan tujuan bimbingan, pengaruh bimbingan Balai Pemasyaraktan, kendala Balai Pemasyarakatan dalam melakukan proses bimbingan terhadap narapidana dalam mencapai tujuan resosialisasi.

BAB III : PENUTUP

Pada bab ini penulis menguraikan mengenai kesimpulan yang dapat diperoleh dari seluruh hasil pembahasan serta saran-saran yang dapat menjadi pertimbangan.